



## *Bupati Bekasi*

### **KEPUTUSAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 027 / Kep. 424-LPB / 2018**

### **TENTANG**

**PERSONIL PENDAMPINGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** : bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Personil Pendampingan Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

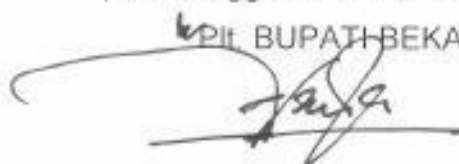
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
8. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Personil Pendampingan Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bekasi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Personil sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pendampingan dan/atau layanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  - b. Melaksanakan pendampingan dan/atau layanan konsultasi penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi: SIRUP, SPSE, e-katalog, dan SIKaP;
  - c. Memonitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Perangkat Daerah sesuai penugasan masing-masing personil;
  - d. Memberikan masukan dan/atau saran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 14 DESEMBER 2018

BUPATI BEKASI, d.



H. EKA SUPRIA ATMAJA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG027 / Kep. 424 - LPB / 2018  
14 DESEMBER 2018PERSONIL PENDAMPINGAN LAYANAN  
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASIDAFTAR PERSONIL PENDAMPINGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

NO	NAMA PERSONIL	PERANGKAT DAERAH
1	H. Sumardi Hadijaya, S.T	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Jhon Ferdianto, S.E	
3	Seni Supeti Murti, S.T	- Dinas Pendidikan
4	H. Yogi Herdiansyah, S.Sos	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
5	Oman, S.E.	- Bagian Umum - Satuan Polisi Pamong Praja
6	Aris Budiarto, S.E	- Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
7	Dudi Nurdin, S.E	- Inspektorat - Bagian Organisasi
8	Siti Rodatul Janah, S.Si., A.Pt.	- Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah
9	Ade Tusdy, S.E.	- Dinas Sosial - Dinas Lingkungan Hidup
10	Bandang Setioko, S.E	- Dinas Perdagangan - Dinas Perindustrian
11	Drs. Endang Suherman	- Bagian Administrasi Pembangunan - Bagian Administrasi Kerjasama
12	Muhammad Ali Akbar, S.E	- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Saeful Kholik, S.Kom	- Dinas Perhubungan - Bagian Perlengkapan
14	Fathul Muzakir, S.T	- Dinas Ketahanan Pangan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Puji Santoso Kurniawan, S.E	- Sekretariat DPRD - Sekretariat Korpri
16	Haryadi M. Lorrar, S.E	- Kecamatan se-Kabupaten Bekasi
17	Neneng Yulianingsih, S.E.	- Dinas Pendapatan Daerah - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Rd. Dewi Handayani Dwipraja, S.E.	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19	Siti Nurwili, S.P.	- Dinas Pertanian - Dinas Perikanan dan Kelautan
20	Ali Umar Hamzah Siregar, S.E	- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
21	David Kurniawan Elia, S.E	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan - Komisi Pemilihan Umum
22	Antara, S.E.	- Dinas Pemadam Kebakaran - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
23	Anief Rachman Dermawan, S.Pt.	- Bagian Administrasi Pemerintahan - Bagian Humas dan Protokol
24	Abdul Rochim, S.E.	- Dinas Tenaga Kerja - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

25	Endang Suranata, S.E.	- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Bagian Hukum
26	Yoga Bataviana, S.Kom	- Dinas Pariwisata - Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
27	Firdila Maulana	- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Nuryali	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Bagian Administrasi Perekonomian

Kep. BUPATI BEKASI



H. EKA SUPRIA ATMAJA

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BEKASI  
BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

WAKTU : Desember 2019  
SALINAN : 4.01.03007 BAGIAN HUKUM

DAAN SAMPAI DENGAN :  
SALINAN PERANGKAT DAERAH

OBJEK	URAIAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL FISIK		Keterangan
				(Rp.)	(%)		K	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bekasi	46.162.888	23.430.766	50,73			0	
-1.2	Penyediaan Bahan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran - Terlaksananya Penyediaan Bahan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bekasi	46.162.888	23.430.766	50,73	33 Jenis ATK	0 Jenis ATK	0	
-1.9	Program penataan peraturan perundang-undangan		1.895.117.033	888.564.000	46,89			49,05	
-19.24	Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum - Bantuan Hukum Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	860.117.033	499.885.000	58,12	105 Perkara	54 Perkara	51,43	
-19.25	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keseluruhan Hukum - Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi - Penyuluhan Hukum Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	360.000.000	170.652.000	47,40	30 Orang	30 Orang	100,00	
-19.26	Kegiatan Penataan Produk Hukum Daerah - Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	30.000.000	30.000.000	100,00	3 Jenis produk hukum	0 Jenis produk hukum	0	
-19.27	Kegiatan Sistem Dokumentasi Produk Hukum Daerah - Terlaksananya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (ADH) Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	55.000.000	53.935.000	98,06	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	100,00	
-19.28	Kegiatan Usulan Pembuatan Naskah Akademis Raporda - Penyusunan Naskah Akademis Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	400.000.000	48.972.000	12,49	8 Naskah/ajukan/teleaban	1 Naskah/ajukan/teleaban	12,50	
-19.29	Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Bekasi - Rencanan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	65.000.000	-	-	2 Produk Hukum	0 Produk Hukum	0	
-19.30	Kegiatan Evaluasi Produk Hukum dan Pelaporan - Rencanakan dan Evaluasi Kegiatan Kabupaten Bekasi - Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	125.000.000	84.120.000	67,30	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	

Cikarang : 19 Desember 2019

1.941.299.921	9.11.994.766	46,99	47,88	HUTANG
---------------	--------------	-------	-------	--------